

Pengaruh Blokade terhadap Akses Pangan di Yaman: Analisis Kebijakan dan Dampaknya

Fajar Agustian Sudrajat¹ Fadhila Nurul Fahmi Shidiq² Jipa Sukarwati³ Sapriya⁴ Intan Indah Megasari⁵

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia,
Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: fajaragustian2508@upi.edu¹

Abstract

The food crisis in Yemen is one of the worst humanitarian crises in the world, occurring in the context of prolonged armed conflict and high dependence on food imports. Since the escalation of the conflict in 2015, the sea and air blockade policy implemented by the military coalition has exacerbated the food insecurity of the civilian population. Against this backdrop, this study aims to analyze the impact of the sea and air blockade policy on food access in Yemen since the escalation of armed conflict in 2015, placing the blockade as a policy instrument that has direct implications for the humanitarian crisis. The study uses a descriptive qualitative approach through a literature review with thematic analysis techniques of scientific articles, international policy documents, and humanitarian agency reports. The results of the study show that systematic restrictions on major ports and airports, particularly the Port of Hodeida, significantly hamper the entry of food and essential commodities, triggering supply shortages, food price spikes, and a decline in people's purchasing power. The implications of this study confirm that the food crisis in Yemen is a man-made crisis (policy-driven crisis) that is closely related to the weak orientation of civilian protection in conflict policies. Therefore, an evaluation of international policies that are more oriented towards fulfilling the right to food and respecting international humanitarian law is needed.

Keywords: Blockade; Food Access; Humanitarian Crisis; International Policy; Yemen

Abstrak

Krisis pangan di Yaman merupakan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia yang terjadi dalam konteks konflik bersenjata berkepanjangan dan ketergantungan tinggi terhadap impor pangan. Sejak eskalasi konflik pada tahun 2015, kebijakan blokade laut dan udara yang diterapkan oleh koalisi militer telah memperburuk kerentanan pangan masyarakat sipil. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan blokade laut dan udara terhadap akses pangan di Yaman sejak eskalasi konflik bersenjata pada tahun 2015, dengan menempatkan blokade sebagai instrumen kebijakan yang berimplikasi langsung terhadap krisis kemanusiaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dengan teknik analisis tematik terhadap artikel ilmiah, dokumen kebijakan internasional, serta laporan lembaga kemanusiaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatasan sistematis terhadap pelabuhan dan bandara utama, khususnya Pelabuhan Hodeida secara signifikan menghambat masuknya pangan dan komoditas esensial, memicu kelangkaan pasokan, lonjakan harga pangan, serta menurunnya daya beli masyarakat. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa krisis pangan di Yaman merupakan krisis buatan manusia (policy-driven crisis) yang berkaitan erat dengan lemahnya orientasi perlindungan warga sipil dalam kebijakan konflik, sehingga diperlukan evaluasi kebijakan internasional yang lebih berorientasi pada pemenuhan hak atas pangan dan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional.

Kata Kunci: Akses Pangan; Blokade; Kebijakan Internasional; Krisis Kemanusiaan; Yaman



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Krisis kemanusiaan di Yaman telah berlangsung selama hampir satu dekade dan berkembang menjadi salah satu bencana kelaparan paling parah di dunia modern, dengan

jutaan penduduk hidup dalam kondisi kerawanan pangan akut dan gizi buruk ekstrem. Sejak eskalasi konflik bersenjata pada tahun 2015, situasi kemanusiaan di Yaman mengalami degradasi yang signifikan ditandai dengan meningkatnya angka malnutrisi, wabah penyakit menular, serta runtuhnya sistem kesehatan nasional (Qirbi & Ismail, 2017). Literatur akademik dan laporan internasional telah secara luas mendokumentasikan skala krisis ini, khususnya dari perspektif kesehatan masyarakat dan epidemiologi yang menyoroti hubungan erat antara konflik bersenjata, kehancuran infrastruktur sipil, dan memburuknya kondisi kesehatan populasi. Federspiel dan Ali (2018) mencatat bahwa konflik berkepanjangan telah mempercepat penyebaran wabah kolera terbesar di dunia yang diperparah oleh kekurangan gizi dan terbatasnya akses terhadap air bersih serta layanan kesehatan dasar. Selain itu, laporan lembaga internasional menunjukkan bahwa jutaan anak di Yaman mengalami malnutrisi akut dan kronis, menjadikan kelaparan sebagai ancaman struktural terhadap kelangsungan hidup generasi mendatang (World Food Programme, 2013; De Waal, 2017).

Studi-studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Federspiel & Ali (2018) serta Qirbi & Ismail (2017) telah memberikan kontribusi signifikan dalam memetakan korelasi antara konflik bersenjata dengan lonjakan angka malnutrisi dan wabah kolera. Narasi dominan dalam kajian-kajian ini umumnya menempatkan kerawanan pangan sebagai dampak turunan (*collateral damage*) yang tak terelakkan dari kekacauan perang, atau fokus pada tantangan logistik dalam penyaluran bantuan kemanusiaan. Namun, terdapat kesenjangan yang krusial dalam diskursus akademik tersebut. Meskipun dampak fisik dari kelaparan telah banyak dibahas, literatur yang ada cenderung terbatas dalam menganalisis blokade sebagai sebuah instrumen kebijakan yang disengaja dan mekanisme hukuman kolektif (*collective punishment*). Kebanyakan analisis memperlakukan blokade pelabuhan dan bandara di Yaman sekadar sebagai taktik militer konvensional atau konsekuensi dari embargo senjata PBB. Pendekatan ini sering kali gagal menangkap dimensi politik dari blokade tersebut: bahwa pembatasan akses pangan bukan sekadar efek samping perang, melainkan sebuah strategi koersif yang dirancang untuk menekan populasi sipil guna mencapai tujuan politik-militer (Mundy, 2018; Fink, 2017).

Kekosongan analisis ini menyebabkan pemahaman yang tidak utuh mengenai akar penyebab krisis. Jika blokade hanya dipandang sebagai hambatan logistik, solusinya akan terbatas pada peningkatan bantuan. Namun, jika blokade dipahami sebagai kebijakan sistemik, maka ia masuk dalam ranah pelanggaran hukum internasional yang lebih serius. Artikel ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menggeser fokus analisis dari sekadar deskripsi dampak kerawanan pangan menuju bedah mekanisme kebijakan blokade. Tulisan ini berargumen bahwa blokade di Yaman berfungsi sebagai senjata perang inkonvensional yang secara efektif menghukum seluruh populasi, sebuah praktik yang menantang batas-batas etika dan legalitas dalam Hukum Humaniter Internasional (Akande & Gillard, 2019). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru dalam memahami kelaparan di Yaman, bukan sebagai bencana alamiah, melainkan sebagai produk kebijakan (*policy-driven catastrophe*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi literatur untuk menganalisis kebijakan blokade terhadap Yaman serta dampaknya terhadap akses pangan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena kebijakan internasional dan krisis kemanusiaan secara mendalam berdasarkan makna, konteks, dan substansi kebijakan yang tertuang dalam berbagai sumber tertulis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal, buku akademik,

dokumen kebijakan internasional, serta laporan lembaga kemanusiaan yang relevan dengan isu blokade dan ketahanan pangan di Yaman. Studi literatur dinilai efektif dalam kajian kebijakan karena mampu merangkum temuan empiris dan konseptual untuk membangun pemahaman komprehensif terhadap dampak kebijakan (Putri et al., 2024). Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik, dengan cara mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema utama yang muncul dalam literatur, seperti kebijakan blokade, akses pangan, dan krisis kemanusiaan. Tema-tema tersebut kemudian ditafsirkan dengan mengaitkannya pada teori kebijakan publik dan kebijakan internasional untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan blokade dan dampaknya terhadap pemenuhan hak atas pangan di Yaman. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari berbagai jurnal ilmiah dan dokumen kebijakan yang kredibel, sehingga hasil analisis memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Wahyuni, 2023).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konflik di Yaman antara pemerintah Yaman dan kelompok Houthi bermula dari adanya kejadian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sekte Zaydi Yaman, di mana pada masa kepemimpinan Presiden Ali Abdullah Saleh menerapkan kebijakan marginalisasi dan represi terhadap kelompok Zaydi (Feierstein, 2019). Kondisi politik yang represif ini menjadi salah satu akar struktural konflik berkepanjangan yang kemudian berdampak luas pada stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Kondisi tersebut berkontribusi pada memburuknya kondisi ketahanan pangan, sebagaimana dicatat dalam laporan *International Crisis Group* (2017) yang menunjukkan bahwa sebanyak tujuh provinsi di Yaman mengalami kondisi darurat pangan dan hampir memasuki tahap kelaparan. Bahkan sebelum eskalasi konflik bersenjata secara masif, laporan Survei Pemantauan Ketahanan Pangan tahun 2013 mencatat bahwa dari total 25,26 juta penduduk, sekitar 4,5 juta orang berada dalam kondisi rawan pangan parah dan lebih dari 6 juta orang mengalami rawan pangan tingkat sedang (World Food Program, 2013). Tingkat malnutrisi kronis dan akut yang tinggi pada periode tersebut menyebabkan sekitar setengah dari anak-anak Yaman mengalami kekurangan gizi kronis, serta satu dari sepuluh anak meninggal sebelum mencapai usia lima tahun.

Kondisi ketahanan pangan yang rapuh tersebut semakin memburuk sejak tahun 2015, ketika terbentuknya militer yang dipimpin oleh Arab Saudi diberlakukan blokade laut dan udara di sejumlah wilayah Yaman, khususnya di kota-kota yang berada di bawah kendali kelompok Houthi, dengan tujuan mencakup kapasitas dan pengaruh kelompok tersebut (Nugraha, Sari, & Mubarak, 2022). Dalam konteks ini, karakteristik struktural ekonomi Yaman menjadi faktor yang sangat menentukan. Yaman merupakan negara yang sangat bergantung pada impor, dengan sekitar 90% kebutuhan pangan nasional dipenuhi melalui impor (Food and Agriculture Organization, 2021). Ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan eksternal menyebabkan setiap pengambilan jalur masuk barang berdampak langsung pada ketersediaan pangan nasional. Salah satu wilayah yang paling terpengaruh oleh blokade kebijakan adalah Kota Hodeida, yang merupakan pelabuhan utama Yaman dan berada di bawah penguasaan kelompok Houthi. Pembatasan ketat terhadap aktivitas pelayaran dan distribusi barang di pelabuhan ini yang menangani lebih dari 70% impor pangan nasional menyebabkan gangguan serius pada rantai pasok bahan makanan pokok seperti gandum dan beras. Akibatnya, ketersediaan pangan nasional mengalami penurunan yang signifikan dan berkontribusi pada memburuknya ketahanan pangan di berbagai wilayah.

Blokade ekonomi yang diberlakukan terhadap Yaman juga berdampak pada harga pangan serta melambatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Data dari World Food Program menunjukkan bahwa harga gandum di Yaman meningkat lebih dari 150% sejak awal konflik,

seiring dengan kelangkaan pasokan dan meningkatnya biaya transportasi akibat keterbatasan bahan bakar. Kenaikan harga pangan ini secara langsung mempengaruhi kemampuan rumah tangga miskin dalam mengakses makanan, mengingat sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar. Pada saat yang sama, penurunan produksi sektor pertanian serta terbatasnya akses tenaga kerja Yaman ke pasar kerja Arab Saudi telah menyebabkan berkurangnya aliran pendapatan bagi banyak rumah tangga. Konflik yang berkepanjangan juga menghambat impor bahan pangan akibat penerapan blokade di pelabuhan laut dan bandara, serta berbagai pelaksanaan administrasi yang diberlakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik (Fadhli, 2023).

Dampak lanjutan dari blokade ekonomi terhadap Yaman ditunjukkan secara nyata dengan meningkatnya tingkat kerawanan pangan dan prevalensi malnutrisi di berbagai kelompok masyarakat. Pembatasan impor pangan dan bahan bakar melalui jalur laut dan udara telah mengganggu sistem distribusi pangan, sehingga konsumsi rumah tangga menurun baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan laporan Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC), sekitar 17–19 juta penduduk Yaman berada dalam kondisi rawan pangan akut (fase 3–5), dengan jutaan anak mengalami gizi buruk (IPC, 2023). Sejak tahun 2017, diperkirakan sekitar dua juta balita setiap tahunnya mengalami kekurangan gizi akut, dan sekitar 20% di antaranya termasuk dalam kategori malnutrisi akut berat (SAM). Selain itu, angka stunting yang mencapai sekitar 50% dari total balita pada tahun 2017 menunjukkan bahwa blokade ekonomi tidak hanya menciptakan krisis pangan jangka pendek, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian generasi (*lost generation*) yang berdampak serius pada kualitas sumber daya Yaman di masa depan (Poetra, 2021).

Penerapan blokade dalam konteks konflik bersenjata secara keseluruhan memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan masyarakat Yaman dalam memenuhi kebutuhan dasar. Keterbatasan mobilitas akibat penayangan harga bahan bakar turut memicu peningkatan harga pangan, termasuk bahan makanan sehari-hari. Mengingat sebelum konflik Yaman bergantung pada impor untuk sekitar 90% kebutuhan pangannya (Coppi, 2018), kebijakan blokade secara substansial membatasi akses terhadap pangan melalui kenaikan harga dan mengurangi ketersediaan bahan makanan di pasar domestik. Selama konflik berlangsung, banyak masyarakat terpaksa meninggalkan mata pencahariannya demi alasan keamanan. Diperkirakan sekitar delapan juta orang kehilangan sumber pendapatan akibat penutupan perusahaan swasta serta perpindahan penduduk dari tempat tinggal mereka. Intensitas serangan udara di wilayah pertanian juga menyebabkan sekitar 40% petani meninggalkan lahan garapannya, padahal sektor agrikultur merupakan salah satu sumber penghidupan utama di Yaman (Alles, 2017; Sowers & Weinthal, 2021). Kondisi ini semakin memperbesar kerentanan ekonomi masyarakat secara luas.

Dalam kajian hubungan internasional, akses pangan bagi masyarakat sipil dalam situasi konflik bersenjata merupakan hak fundamental yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia. Dalam konteks Yaman, temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan blokade laut dan udara memiliki penegakan hukum yang signifikan karena secara langsung memberikan hak atas pangan bagi masyarakat sipil. Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 menegaskan kewajiban pihak yang berkonflik untuk melindungi masyarakat sipil dari penderitaan yang berlebihan. Pasal 23 Konvensi Jenewa IV mengatur bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan, termasuk bahan pangan dan obat-obatan, harus tanpa diskriminasi. Pembatasan sistematis terhadap pelabuhan dan bandara utama Yaman yang menghambat masuknya bahan pangan dan bantuan kemanusiaan menunjukkan ketidaksesuaian antara praktik blokade dan kewajiban perlindungan sipil sebagaimana diatur dalam hukum humaniter internasional (Fink, 2017; Akande & Gillard, 2019).

Perlindungan terhadap akses pangan diperkuat dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977. Pasal 54 ayat (1) dan (2) secara eksplisit melarang penggunaan kelaparan terhadap penduduk sipil sebagai metode perang serta melarang tindakan yang merusak atau membatasi objek-objek yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup masyarakat sipil, termasuk pangan dan sarana pendistribusiannya. Dalam konteks Yaman, blokade kebijakan yang menghambat impor pangan mencakup sekitar 90% kebutuhan nasional dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan tersebut karena secara sistemik membatasi akses masyarakat terhadap pangan (Coppi, 2018; Mundy, 2018). Dari sudut pandang hukum hak asasi manusia internasional, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) Tahun 1966 menegaskan hak atas standar hidup yang layak, termasuk hak atas pangan yang memadai sebagaimana diatur dalam Pasal 11. Negara dan aktor internasional memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut. Blokade kebijakan yang menghalangi akses terhadap pangan dan bahan bakar menunjukkan pelanggaran terhadap kewajiban penghormatan, terutama ketika dampaknya bersifat luas dan berkepanjangan terhadap penduduk sipil (Messer & Cohen, 2015; De Waal, 2017).

Dalam Hukum Pidana Internasional, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional mengklasifikasikan kerugian terhadap masyarakat sipil sebagai metode perang sebagai kejahatan perang. Pasal 8 ayat (2)(b)(xxv) menyatakan bahwa tindakan dengan sengaja menghalangi bantuan kemanusiaan dan benda-benda yang diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana internasional. Dengan demikian, blokade kebijakan di Yaman yang menyebabkan kelangkaan pangan dan peningkatan angka malnutrisi berpotensi diterjemahkan sebagai bentuk kejahatan kelaparan dalam konflik bersenjata (Akande & Gillard, 2019; Graham, 2021). Penguatan norma internasional juga tercermin dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2417 Tahun 2018 yang secara tegas mengutuk penggunaan kelaparan sebagai senjata perang dan menegaskan kewajiban semua pihak yang berkonflik untuk menjamin akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.

Secara keseluruhan, hasil kajian ini menegaskan bahwa penerapan kebijakan blokade ekonomi memiliki kontribusi yang signifikan terhadap terjadinya krisis kemanusiaan di Yaman, khususnya dalam memberikan hak atas pangan yang layak bagi penduduk sipil. Dampak kumulatif berupa pasokan kelangkaan, menggerakkan harga pangan, serta menurunnya daya beli rumah tangga menunjukkan bahwa blokade ekonomi berfungsi sebagai faktor struktural yang memperdalam kerawanan pangan dan ketimpangan akses terhadap kebutuhan dasar. Dalam perspektif situasi kebijakan publik dan hukum humaniter internasional, kondisi ini menimbulkan konsekuensi serius terhadap perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata. Kebijakan blokade yang menghambat pasokan kebutuhan dasar berpotensi melanggar kewajiban negara dan pihak yang berkonflik untuk melindungi warga sipil dari penderita yang berlebihan (Heffes & Kotlik, 2014). Lebih lanjut, pemberian akses terhadap pangan dan bantuan kemanusiaan dipandang dengan prinsip perlindungan sipil serta kewajiban untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan yang bersifat netral dan tidak memihak (De Waal, 2017).

Krisis pangan di Yaman tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegagalan teknis distribusi logistik atau sebagai dampak tidak langsung dari konflik bersenjata, melainkan sebagai refleksi dari lemahnya orientasi nilai-nilai kemanusiaan dalam perumusan dan implementasi kebijakan konflik. Blokade kebijakan yang membatasi akses pangan menunjukkan tidak adanya prinsip moral dan tanggung jawab kolektif dalam melindungi masyarakat sipil. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian Pratomo dkk. (2025), kebijakan dan praktik sosial yang mengabaikan nilai empati, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap martabat manusia berpotensi melahirkan krisis kemanusiaan yang bersifat sistemik. Oleh

karena itu, blokade di Yaman dapat dipandang sebagai kebijakan yang gagal menginternalisasi nilai-nilai dasar kemanusiaan yang seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan publik, termasuk dalam konteks konflik internasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan blokade laut dan udara memiliki pengaruh signifikan terhadap memburuknya akses pangan di Yaman sejak eskalasi konflik bersenjata tahun 2015. Blokade yang membatasi jalur impor utama terbukti berkontribusi langsung terhadap kelangkaan pangan, peningkatan harga bahan makanan, serta penurunan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya memperparah kerawanan pangan dan malnutrisi, terutama pada kelompok rentan. Temuan ini menegaskan bahwa krisis pangan di Yaman bukan semata akibat konflik bersenjata, melainkan merupakan konsekuensi dari kebijakan konflik yang bersifat sistemik dan berdampak luas terhadap penduduk sipil. Namun demikian, kesimpulan ini didasarkan pada analisis studi literatur sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati sesuai dengan konteks kebijakan dan dinamika konflik yang terus berkembang. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder tanpa pengumpulan data lapangan, sehingga belum sepenuhnya menangkap pengalaman empiris masyarakat terdampak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan kualitatif dengan data lapangan atau studi komparatif guna memperkuat analisis dampak kebijakan blokade. Selain itu, hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi kebijakan konflik internasional dengan menempatkan perlindungan warga sipil dan pemenuhan hak atas pangan sebagai prioritas utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Akande, D., & Gillard, E. C. (2019). Conflict-induced food insecurity and the war crime of starvation of civilians as a method of warfare. *Journal of International Humanitarian Legal Studies*, 10(2), 366–392. <https://doi.org/10.1163/18781527-01002002>
- Alles, L. (2017). *Yemen's man-made food security crisis*. Oxfam.
- Coppi, G. (2018). *The humanitarian crisis in Yemen: Beyond the man-made disaster*. International Peace Institute.
- De Waal, A. (2017). *Mass starvation: The history and future of famine*. John Wiley & Sons.
- DeSimone, M. (2021). Broken, beaten, and starved: Attacking water resources as objects indispensable to the survival of a civilian population in Yemen's internal armed conflict. *American University International Law Review*, 36(2), 337–375.
- Fadhli, M. F. (2023). *Kegagalan kebijakan luar negeri pemerintah Yaman dalam mengatasi krisis pangan pada Arab Spring tahun 2011–2014* (Disertasi doctoral). Universitas Islam Indonesia.
- Federspiel, F., & Ali, M. (2018). The cholera outbreak in Yemen: Lessons learned and way forward. *BMC Public Health*, 18(1), Article 1338. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-6227-6>
- Feierstein, G. M. (2019). *Yemen: The 60-year war*. Middle East Institute.
- Fink, M. D. (2017). Naval blockade and the humanitarian crisis in Yemen. *Netherlands International Law Review*, 64(2), 291–307. <https://doi.org/10.1007/s40802-017-0092-3>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2021). *Yemen food security response and resilience project*. <https://www.fao.org/environmental-social-safeguards/project-detail/yemen-food-security-response-and-resilience-project/en>
- Graham, L. (2021). Pathways to accountability for starvation crimes in Yemen. *Case Western Reserve Journal of International Law*, 53(1), 401–430.

- Heffes, E., & Kotlik, M. D. (2014). Special agreements as a means of enhancing compliance with IHL in non-international armed conflicts: An inquiry into the governing legal regime. *International Review of the Red Cross*, 96(895–896), 1195–1224.
- Integrated Food Security Phase Classification. (2023). *Integrated food security phase classification: Yemen*. <https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/en/?country=YE>
- International Crisis Group. (2017). *Instruments of pain: Conflict and famine in Yemen*. <https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/yemen/b052-instruments-pain-i-conflict-and-famine-yemen>
- Messer, E., & Cohen, M. J. (2015). *Conflict, food insecurity, and globalization*. In R. Paarlberg, J. L. Clapp, & M. J. Cohen (Eds.), *The Oxford handbook of food, politics, and society* (221–238). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195397772.013.0028>
- Mundy, M. (2018). *The strategies of the coalition in the Yemen war: Aerial bombardment and food war*. World Peace Foundation.
- Nugraha, F. A., Sari, D. S., & Mubarak, K. Z. (2022). Bantuan Kemanusiaan UNICEF terhadap Anak-Anak terdampak Kelaparan dan Malnutrisi dalam Konflik Yaman. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 6(1), 32–49.
- Poetra, A. D. (2021). *Peran World Food Programme (WFP) dalam mengatasi krisis pangan di Yaman tahun 2015–2019* (Disertasi doktoral). Universitas Islam Indonesia.
- Pratomo, W., Sapriya, S., Sundawa, D., & Fitriyasi, S. (2025). Sariswara dalam dinamika budaya: Analisis nilai budaya dan karakter bangsa. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(2), 292–304.
- Putri, A. A., Zudin, N. N., Afifah, R. N., Salsabilah, N., & Karisma, L. (2024). Literature review: An analysis of the implementation of public service agency (BLU) towards SINTA-indexed public sector accountability. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 22(3), 126–140.
- Qirbi, N., & Ismail, S. A. (2017). Health system destruction: Another collateral damage of the war in Yemen. *International Health*, 9(2), 75–77. <https://doi.org/10.1093/inthealth/ihx002>
- Sowers, J., & Weinthal, E. (2021). Humanitarian challenges and the targeting of civilian infrastructure in the Yemen war. *International Affairs*, 97(1), 157–177. <https://doi.org/10.1093/ia/iiaa166>
- United Nations Security Council. (2018). *Resolution 2417*. United Nations.
- Wahyuni, S. (2023). Analisis tematik dalam penelitian kualitatif kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 89–101.
- World Food Programme. (2013). *The state of food security and nutrition in Yemen: Comprehensive food security survey*. World Food Programme.